



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf h, angka 1 huruf D Bab VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.834.686.185.305,- (*satu triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah*) bertambah sebesar Rp.46.987.852.878,- (*empat puluh enam miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.881.674.038.183,- (*satu triliyun delapan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

1. semula	Rp.	1.834.686.185.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	46.987.852.878
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.881.674.038.183

b. belanja daerah: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:		
1. semula	Rp.	1.776.736.185.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	52.491.610.095
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.829.227.795.400
c. pembiayaan daerah: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari;		
1. semula	Rp.	98.553.757.217
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp.	98.553.757.217
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	(52.446.242.783)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:		
1. semula	Rp.	597.631.508.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.142.915.911
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	598.774.423.911
b. pendapatan transfer:		
1. semula	Rp.	1.229.554.677.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	45.844.936.967
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.275.399.614.272

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:

1. semula	Rp.	418.100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.463.518.113)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	400.636.481.887

b. retribusi daerah:

1. semula	Rp.	60.388.648.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.540.762.961)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	57.847.885.039

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:

1. semula	Rp.	25.004.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	4.848.770.537
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	29.852.770.537

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1. semula	Rp.	94.138.860.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	16.298.426.448
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	110.437.286.448
(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:		
a. pendapatan transfer pemerintah pusat:		
1. semula	Rp.	982.783.017.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	48.076.795.808
Jumlah dana transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	1.030.859.812.808
b. pendapatan transfer antar daerah:		
1. semula	Rp.	246.771.660.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.231.858.841)
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	244.539.801.464
(3) lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah:		
1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000
b. dana darurat:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:		
1. semula	Rp.	26.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hotel setelah perubahan	Rp.	26.000.000.000
b. pajak restoran:		
1. semula	Rp.	100.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.000.000.000)
Jumlah pajak restoran setelah perubahan	Rp.	83.000.000.000
c. pajak hiburan:		
1. semula	Rp.	20.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(463.518.113)
Jumlah pajak hiburan setelah perubahan	Rp.	19.536.481.887

d. pajak reklame:

1. semula	Rp.	17.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame setelah perubahan	Rp.	17.000.000.000

e. pajak penerangan jalan:

1. semula	Rp.	78.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan	Rp.	78.000.000.000

f. pajak parkir:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

g. pajak sarang burung walet:

1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak sarang burung walet setelah perubahan	Rp.	100.000.000

h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan:

1. semula	Rp.	54.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan setelah perubahan	Rp.	54.000.000.000

i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:

1. semula	Rp.	117.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah perubahan	Rp.	117.000.000.000

Pasal 7

(1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:

1. semula	Rp.	25.041.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hotel setelah perubahan	Rp.	25.041.000.000

b. pajak motel:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak motel setelah perubahan	Rp.	0

c. pajak losmen:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak losmen setelah perubahan	Rp.	0

d. pajak gubug pariwisata:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gubug pariwisata setelah perubahan	Rp.	0

e. pajak wisma pariwisata:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak wisma pariwisata setelah perubahan	Rp.	0

f. pajak pesanggrahan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pesanggrahan setelah perubahan	Rp.	0

g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	359.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah penginapan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	359.000.000

h. pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):

1. semula	Rp.	600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) setelah perubahan	Rp.	600.000.000

(2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a. pajak restoran dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	60.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.500.000.000)
Jumlah pajak restoran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	52.000.000.000

b. pajak rumah makan dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	29.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.500.000.000)
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000

c. pajak kafetaria dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.900.000.000
Jumlah pajak kafetaria dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.900.000.000

d. pajak kantin dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	50.000.000
Jumlah pajak kantin dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	50.000.000

e. pajak warung dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

f. pajak bar dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	50.000.000
Jumlah pajak bar dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	50.000.000

g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	4.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000)
Jumlah pajak jasa boga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000

(3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a. pajak tontonan film:

1. semula	Rp.	8.600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.693.518.113)
Jumlah pajak tontonan film setelah perubahan	Rp.	6.906.481.887

b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	300.000.000

c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0

d. pajak pameran dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pameran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0

e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak sirkus/ akrobat/ sulap dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0

g. pajak permainan biliar, bowling dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak permainan biliar, bowling dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	500.000.000

h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.230.000.000
Jumlah pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	2.730.000.000
i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>) dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	2.300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>) setelah perubahan	Rp.	2.300.000.000
j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	800.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	800.000.000

(4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron:		
1. semula	Rp.	13.770.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.325.000)
Jumlah pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron setelah perubahan	Rp.	13.754.675.000
b. pajak reklame kain:		
1. semula	Rp.	3.000.000.000

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame Kain setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000
c. pajak reklame melekat/stiker:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame melekat/ stiker setelah perubahan	Rp.	0
d. pajak reklame selebaran:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame selebaran setelah perubahan	Rp.	0
e. pajak reklame berjalan:		
1. semula	Rp.	150.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame berjalan setelah perubahan	Rp.	150.000.000
f. pajak reklame udara:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame udara setelah perubahan	Rp.	0
g. pajak reklame apung:		
1. semula	Rp.	0

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame apung setelah perubahan	Rp.	0
h. pajak reklame suara:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah reklame suara setelah perubahan	Rp.	0
i. pajak reklame film/slide:		
1. semula	Rp.	30.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame film/slide	Rp.	30.000.000
j. pajak reklame peragaan:		
1. semula	Rp.	50.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.325.000
Jumlah pajak reklame peragaan setelah perubahan	Rp.	65.325.000
(5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:		
a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri:		
1. semula	Rp.	5.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	8.600.000
Jumlah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri setelah perubahan	Rp.	13.600.000
b. pajak penerangan jalan sumber lain:		
1. semula	Rp.	77.995.000.000

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.600.000)
Jumlah pajak penerangan jalan sumber lain setelah perubahan	Rp.	77.986.400.000

(6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:

a. pajak parkir:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

(7) Anggaran pajak burung sarang walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:

a. pajak burung sarang walet:

1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak burung sarang walet setelah perubahan	Rp.	100.000.000

(8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:

a. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan:

1. semula	Rp.	54.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan setelah perubahan	Rp.	54.000.000.000

(9) Anggaran bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas:

a. pajak bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak:

1. semula	Rp.	115.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah pajak bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak setelah perubahan	Rp.	115.000.000.000
---	-----	-----------------

b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru:

1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000
---	-----	---------------

Pasal 8

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. retribusi jasa umum:

1. semula	Rp.	39.947.520.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.540.762.961)

Jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan	Rp.	37.406.757.039
--	-----	----------------

b. retribusi jasa usaha:

1. semula	Rp.	11.941.128.000
-----------	-----	----------------

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan	Rp.	11.941.128.000
c. retribusi perizinan tertentu:		
1. semula	Rp.	8.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi perizinan tertentu setelah perubahan	Rp.	8.500.000.000

Pasal 9

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan):		
1. semula	Rp.	14.504.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.348.770.537
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) setelah perubahan	Rp.	16.852.770.537
b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum):		
1. semula	Rp.	10.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.500.000.000
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum) setelah perubahan	Rp.	13.000.000.000

Pasal 10

(2) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	550.000.000

b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	117.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	117.000.000.000

c. jasa giro:

1. semula	Rp.	2.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	4.096.287.779
Jasa giro setelah perubahan	Rp.	6.596.287.779

d. hasil pengelolaan dana bergulir:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0

e. pendapatan bunga:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.912.269

Pendapatan bunga setelah perubahan	Rp.	15.912.269
f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah:		
1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan	Rp.	100.000.000
g. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0
h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0
i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	118.565.369
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan setelah perubahan	Rp.	118.565.369
j. pendapatan denda pajak daerah:		
1. semula	Rp.	1.950.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	283.815.207

Pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan	Rp.	2.233.815.207
k. pendapatan denda retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	60.200.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	60.200.000
l. pendapatan hasil eksekusi atas Jaminan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan setelah perubahan	Rp.	0
m. pendapatan dari pengembalian:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	696.562.345
Pendapatan dari pengembalian setelah perubahan	Rp.	696.562.345
n. pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	88.656.160.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.052.418.479
pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	99.708.578.479
o. pendapatan denda pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan:		
1. semula	Rp.	0

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
p. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	0
q. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah:		
1. semula	Rp.	205.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	34.865.000
Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah setelah perubahan	Rp.	240.365.000

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. dana perimbangan:

1. semula	Rp.	982.783.017.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	35.236.591.808
Dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.018.019.608.808

b. dana insentif daerah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	12.840.204.000
Dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.	12.840.204.000

(2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

jdih.pontianak.go.id

a. dana transfer umum-dana bagi hasil:		
1. semula	Rp.	58.756.231.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	35.062.591.808
Dana transfer umum-dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	93.818.822.808
b. dana transfer umum-dana alokasi umum:		
1. semula	Rp.	710.591.805.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	710.591.805.000
c. dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik:		
1. semula	Rp.	29.028.671.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik setelah perubahan	Rp.	29.028.671.000
d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik:		
1. semula	Rp.	184.406.310.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	174.000.000
Dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil setelah perubahan	Rp.	184.580.310.000
(3) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:		
a. dana insentif daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	12.840.204.000
Dana transfer umum-dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	12.840.204.000
(4) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:		
a. pendapatan bagi hasil pajak:		

1. semula	Rp.	244.690.660.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.235.858.841)
Pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	240.454.801.464

Pasal 12

(1) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

pendapatan hibah dari pemerintah pusat:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

(2) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:

lain – lain pendapatan:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Lain lain pendapatan setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

Pasal 13

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi:

1. semula	Rp.	1.258.070.896.764
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	76.474.073.353
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.334.544.970.117

b. belanja modal:

1. semula	Rp.	516.665.288.541
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(24.404.344.162)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	492.260.944.379

c. belanja tidak terduga:

1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	421.880.904
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.421.880.904

Pasal 14

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1. semula	Rp.	642.824.524.724
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	51.307.984.821
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	694.132.509.545

b. belanja barang dan jasa:

1. semula	Rp.	536.419.718.840
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	28.612.578.223
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	565.032.297.063

c. belanja bunga:

1. semula	Rp.	1.200.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(217.657.259)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	982.342.741

d. belanja subsidi:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. belanja hibah:		
1. semula	Rp.	71.115.353.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.877.638.200)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	68.237.715.000
f. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp.	6.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(351.194.232)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.160.105.768

Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	327.504.580.008
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	14.477.292.552
Jumlah gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	341.981.872.560

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	167.288.724.424
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	24.910.868.643
Jumlah tambahan penghasilan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	192.199.593.067

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	94.194.151.062
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.811.104)
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	94.192.339.958

d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD:

1. semula	Rp.	28.508.965.878
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(146.074.466)
Jumlah gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan	Rp.	28.362.891.412

e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	1.593.946.402
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	537.395.360
Jumlah gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	2.131.341.762

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	1.170.966.733
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	118.000.000
Jumlah penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.288.966.733

g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	0
h. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	22.563.190.217
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.412.313.836
Jumlah belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	33.975.504.053
(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:		
a. belanja barang:		
1. semula	Rp.	128.673.037.304
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	12.786.553.174
Jumlah belanja barang setelah perubahan	Rp.	141.459.590.478
b. belanja jasa:		
1. semula	Rp.	224.140.791.510
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.952.248.232)
Jumlah belanja jasa setelah perubahan	Rp.	219.188.543.278
c. belanja pemeliharaan:		
1. semula	Rp.	37.064.847.999
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	217.921.353
Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan	Rp.	37.282.769.352
d. belanja perjalanan dinas:		
1. semula	Rp.	28.341.292.213
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	730.695.037

Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan	Rp.	29.071.987.250
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat:		
1. semula	Rp.	4.566.586.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.501.110.000
Jumlah belanja uang dan/atau jasa setelah perubahan	Rp.	6.067.696.000
f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah:		
1. semula	Rp.	50.817.001.884
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	487.656.323
Jumlah belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	51.304.658.207
g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	62.816.161.930
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	17.840.890.568
Jumlah belanja barang dan jasa Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	80.657.052.498
(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:		
a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:		
1. semula	Rp.	38.276.350.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.850.425.000)
Jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum setelah perubahan	Rp.	35.425.925.000

b. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah:

1. semula	Rp.	29.511.190.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.990.000)
Jumlah belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	29.497.200.000

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik:

1. semula	Rp.	3.314.590.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik setelah perubahan	Rp.	3.314.590.000

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas:

a. belanja bantuan sosial kepada individu:

1. semula	Rp.	1.211.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	569.805.768
Jumlah belanja bantuan sosial kepada Individu setelah perubahan	Rp.	1.781.105.768

b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga:

1. semula	Rp.	4.600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(221.000.000)
Jumlah belanja bantuan sosial kepada keluarga setelah perubahan	Rp.	4.379.000.000

c. belanja bantuan Sosial Kelompok Masyarakat:

1. semula	Rp.	500.000.000
-----------	-----	-------------

Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000)
Jumlah belanja bantuan sosial kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	0

d. belanja bantuan Sosial kepada lembaga non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya):

1. semula	Rp.	200.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000)
Jumlah belanja bantuan sosial kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 16

(1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	237.162.067.376
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	20.140.854.370
Jumlah belanja gaji pokok aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	257.302.921.746

b. belanja tunjangan Keluarga aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	25.501.357.932
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.305.255.170)
belanja tunjangan Keluarga aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	21.196.102.762

c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	5.050.005.334
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	432.746.275
Jumlah tunjangan jabatan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	5.482.751.609

d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	18.805.289.108
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.864.138.422)
Jumlah tunjangan fungsional aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	15.941.150.686

e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	4.245.974.801
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(429.819.796)
Jumlah tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	3.816.155.005

f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	16.428.702.029
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.118.151.301)
Jumlah belanja tunjangan beras aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	13.310.550.728

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	1.098.459.951
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(579.117.434)
Jumlah tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	519.342.517

h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	22.891.647
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.895.337)
Jumlah belanja pembulatan gaji setelah perubahan	Rp.	3.996.310

i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	16.806.367.743
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	5.584.476.415
Jumlah iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	22.390.844.158

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	595.963.246
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(90.887.955)
Jumlah iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	505.075.291

k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	1.787.500.841
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(274.519.093)
Jumlah belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	1.512.981.748

(2) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	159.068.666.682
-----------	-----	-----------------

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	28.925.376.843
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	187.994.043.525
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	3.316.565.150
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	330.199.529
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja setelah perubahan	Rp.	3.646.764.679
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	461.680.185
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	97.104.678
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	558.784.863
d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	4.441.812.407
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.441.812.407)
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	0
(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifitas lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:		

a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah:

1. semula	Rp.	10.324.920.888
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	447.940.456
Jumlah belanja insentif aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	10.772.861.344

b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah:

1. semula	Rp.	2.768.871.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(700.194.005)
Jumlah belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.068.677.395

c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah:

1. semula	Rp.	57.082.933.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah setelah perubahan	Rp.	57.082.933.000

d. belanja tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah:

1. semula	Rp.	1.870.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.870.500.000

e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	2.500.112.795
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	45.167.205
Jumlah belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	2.545.280.000

f. belanja honorarium:

1. semula	Rp.	18.392.712.979
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	246.563.240
Jumlah belanja honorarium setelah perubahan	Rp.	18.639.276.219

g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah:

1. semula	Rp.	1.254.100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(41.288.000)
Jumlah jasa pengelolaan barang milik daerah setelah perubahan	Rp.	1.212.812.000

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. belanja uang representasi DPRD:

1. semula	Rp.	1.148.482.946
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(144.472.946)
Jumlah belanja uang representasi DPRD setelah perubahan	Rp.	1.004.010.000

b. belanja tunjangan keluarga DPRD:

1. semula	Rp.	128.024.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	189.000
Jumlah tunjangan keluarga DPRD setelah perubahan	Rp.	128.213.400

c. belanja tunjangan beras DPRD:

1. semula	Rp.	139.045.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.200
Jumlah belanja tunjangan beras DPRD setelah perubahan	Rp.	139.046.400

d. belanja uang paket DPRD:

1. semula	Rp.	86.058.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang paket DPRD setelah perubahan	Rp.	86.058.000

e. belanja tunjangan jabatan DPRD:

1. semula	Rp.	1.455.814.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan DPRD setelah perubahan	Rp.	1.455.814.500

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD:

1. semula	Rp.	119.668.500
-----------	-----	-------------

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD setelah perubahan	Rp.	119.668.500
g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD:		
1. semula	Rp.	14.433.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD setelah perubahan	Rp.	14.433.300
h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	7.938.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	7.938.000.000
i. belanja tunjangan reses DPRD:		
1. semula	Rp.	1.984.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan reses DPRD setelah perubahan	Rp.	1.984.500.000
j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	462.264
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	462.264

k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD:

1. semula	Rp.	8.827.476.768
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.791.720)
Jumlah belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	8.825.685.048

l. belanja tunjangan transportasi DPRD:

1. semula	Rp.	6.642.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan transportasi DPRD setelah perubahan	Rp.	6.642.000.000

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD:

1. semula	Rp.	25.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang jasa pengabdian DPRD setelah perubahan	Rp.	25.000.000

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	58.614.358
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	58.614.358

b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	7.644.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	7.644.000

c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	98.280.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	98.280.000

d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	8.111.040
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	8.111.040

e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	404.362
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Waki Wali Kota setelah perubahan	Rp.	404.362

f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	1.120
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.120

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	6.420.960
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	6.420.960

h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	131.040
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	131.040

i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota:

1. semula	Rp.	393.120
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	393.120

j. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan pajak daerah:

1. semula	Rp.	1.342.301.402
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	571.060.360

Jumlah belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	1.913.361.762
k. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	71.645.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.665.000)
Jumlah belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	37.980.000
(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri atas:		
a. belanja dana operasional DPRD:		
1. semula	Rp.	393.120.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana operasional DPRD setelah perubahan	Rp.	393.120.000
b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	777.846.733
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	118.000.000
Jumlah belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	895.846.733
(7) Anggaran belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:		

a. belanja pegawai bantuan operasional sekolah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pegawai bantuan operasional sekolah setelah perubahan	Rp.	0

(8) Anggaran belanja pegawai badan layanan usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h terdiri atas:

a. belanja pegawai badan layanan usaha daerah:

1. semula	Rp.	22.563.190.217
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.412.313.836
Jumlah pegawai badan layanan usaha daerah setelah perubahan	Rp.	33.975.504.053

Pasal 17

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp.	17.212.076.120
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.269.218.920)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	12.942.857.200

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp.	41.184.513.925
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.522.496.110
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	43.707.010.035

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula	Rp.	112.947.160.095
-----------	-----	-----------------

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.805.568.587)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	100.141.591.508
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1. semula	Rp.	336.847.881.301
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.473.504.773)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	326.374.376.528
e. belanja modal aset tetap lainnya:		
1. semula	Rp.	6.396.409.900
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	404.968.283
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	6.801.378.183
f. belanja modal aset lainnya:		
1. semula	Rp.	2.077.247.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	216.483.725
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	2.293.730.925

Pasal 18

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

a. belanja tidak terduga:		
a. semula	Rp.	2.000.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	421.880.904
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.421.880.904

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

jdih.pontianak.go.id

1. semula	Rp.	20.550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.503.757.217
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	23.053.757.217
b. pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp.	78.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.000.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	75.500.000.000

Pasal 20

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	0

b. pencairan dana cadangan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. penerimaan pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	50.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	50.000.000
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. penyertaan modal daerah:		
1. semula	Rp.	16.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.000.000.000)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	13.500.000.000
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1. semula	Rp.	62.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	62.000.000.000
d. pemberian pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	Rp.	0

Pasal 21

(1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:

penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah:

1. semula	Rp.	16.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.000.000.000)

Jumlah penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah setelah perubahan

Rp.

13.500.000.000

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 52.446.242.783.- (*lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 52.446.242.783.- (*lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil -Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 13 Oktober 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 54



PEMERINTAH PONTIANAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.834.686.185.305	1.881.674.038.183	46.987.852.878	3
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	597.631.508.000	598.774.423.911	1.142.915.911	0
4.1.01	Pajak Daerah	418.100.000.000	400.636.481.887	(17.463.518.113)	(4)
4.1.01.06	Pajak Hotel	26.000.000.000	26.000.000.000	0	0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	25.041.000.000	25.041.000.000	0	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	25.041.000.000	25.041.000.000	0	0
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	359.000.000	359.000.000	0	0
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	359.000.000	359.000.000	0	0
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	600.000.000	600.000.000	0	0
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	600.000.000	600.000.000	0	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	100.000.000.000	83.000.000.000	(17.000.000.000)	(17)
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	60.500.000.000	52.000.000.000	(8.500.000.000)	(14)
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	60.500.000.000	52.000.000.000	(8.500.000.000)	(14)
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	29.500.000.000	20.000.000.000	(9.500.000.000)	(32)
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	29.500.000.000	20.000.000.000	(9.500.000.000)	(32)
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	0	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	0	50.000.000	50.000.000	0
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000	3.000.000.000	(1.000.000.000)	(25)
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000	3.000.000.000	(1.000.000.000)	(25)
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000.000	19.536.481.887	(463.518.113)	(2)
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	8.600.000.000	6.906.481.887	(1.693.518.113)	(20)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	8.600.000.000	6.906.481.887	(1.693.518.113)	(20)
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000	300.000.000	0	0
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000	300.000.000	0	0
4.1.01.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0	0	0	0
4.1.01.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0	0	0	0
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0	0	0	0
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0	0	0	0
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0	0	0	0
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0	0	0	0
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000	500.000.000	0	0
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000	500.000.000	0	0
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.500.000.000	2.730.000.000	1.230.000.000	82
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.500.000.000	2.730.000.000	1.230.000.000	82
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	800.000.000	800.000.000	0	0
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	800.000.000	800.000.000	0	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	17.000.000.000	17.000.000.000	0	0
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	13.770.000.000	13.754.675.000	(15.325.000)	(0)
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	13.770.000.000	13.754.675.000	(15.325.000)	(0)
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	50.000.000	65.325.000	15.325.000	31
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	50.000.000	65.325.000	15.325.000	31
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	78.000.000.000	78.000.000.000	0	0
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.000.000	13.600.000	8.600.000	172
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.000.000	13.600.000	8.600.000	172
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.995.000.000	77.986.400.000	(8.600.000)	(0)
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.995.000.000	77.986.400.000	(8.600.000)	(0)
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	0	0
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	0	0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0
4.1.01.15.01	PBBP2	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117.000.000.000	117.000.000.000	0	0
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	115.000.000.000	115.000.000.000	0	0
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	115.000.000.000	115.000.000.000	0	0
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	60.388.648.000	57.847.885.039	(2.540.762.961)	(4)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	39.947.520.000	37.406.757.039	(2.540.762.961)	(6)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.066.720.000	3.525.957.039	(2.540.762.961)	(42)
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.000.000.000	3.459.237.039	(2.540.762.961)	(42)
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	66.720.000	66.720.000	0	0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.240.000.000	25.240.000.000	0	0
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/	25.240.000.000	25.240.000.000	0	0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.740.800.000	3.740.800.000	0	0
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	25.000.000	25.000.000	0	0
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.065.800.000	2.065.800.000	0	0
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000	80.000.000	0	0
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000	80.000.000	0	0
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000	80.000.000	0	0
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000	80.000.000	0	0
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000	240.000.000	0	0
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat	240.000.000	240.000.000	0	0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.941.128.000	11.941.128.000	0	0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.537.247.000	4.537.247.000	0	0
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	333.587.000	333.587.000	0	0
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000	356.000.000	0	0
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.297.660.000	3.297.660.000	0	0
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0	0	0	0
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	550.000.000	550.000.000	0	0
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	30.000.000	30.000.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	546.800.000	546.800.000	0	0
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	546.800.000	546.800.000	0	0
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.500.713.000	2.500.713.000	0	0
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.500.713.000	2.500.713.000	0	0
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.275.600.000	3.275.600.000	0	0
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.275.600.000	3.275.600.000	0	0
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.768.000	50.768.000	0	0
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	7.700.000	7.700.000	0	0
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	43.068.000	43.068.000	0	0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.004.000.000	29.852.770.537	4.848.770.537	19
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	25.004.000.000	29.852.770.537	4.848.770.537	19
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.504.000.000	16.852.770.537	2.348.770.537	16
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.504.000.000	16.852.770.537	2.348.770.537	16
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	10.500.000.000	13.000.000.000	2.500.000.000	24
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	10.500.000.000	13.000.000.000	2.500.000.000	24
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.138.860.000	110.437.286.448	16.298.426.448	17
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000	550.000.000	0	0
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	138.000.000	138.000.000	0	0
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	138.000.000	138.000.000	0	0
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	412.000.000	412.000.000	0	0
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	412.000.000	412.000.000	0	0
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	117.000.000	117.000.000	0	0
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	117.000.000	117.000.000	0	0
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	117.000.000	117.000.000	0	0
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000	6.596.287.779	4.096.287.779	164
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.287.698.957	6.383.986.736	4.096.287.779	179
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.287.698.957	6.383.986.736	4.096.287.779	179
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	158.177.511	158.177.511	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	158.177.511	158.177.511	0	0
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	54.123.532	54.123.532	0	0
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	54.123.532	54.123.532	0	0
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0	15.912.269	15.912.269	0
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	15.912.269	15.912.269	0
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	15.912.269	15.912.269	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000	100.000.000	0	0
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000	100.000.000	0	0
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	118.565.369	118.565.369	0
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	118.565.369	118.565.369	0
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	118.565.369	118.565.369	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.950.000.000	2.233.815.207	283.815.207	15
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	200.000.000	200.000.000	0	0
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	0	0	0	0
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0	0	0	0
4.1.04.12.06.0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	0	0	0	0
4.1.04.12.06.0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	0	0	0	0
4.1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	0	0	0	0
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	20.000.000	20.000.000	0	0
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	612.000.000	612.466.890	466.890	0
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000	300.000.000	0	0
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	250.000.000	250.000.000	0	0
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	7.000.000	7.000.000	0	0
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0	144.179	144.179	0
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	35.000.000	35.000.000	0	0
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	0	322.711	322.711	0
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.000.000	20.000.000	0	0
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	102.000.000	107.790.547	5.790.547	6
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	50.000.000	50.000.000	0	0
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0	1.811.515	1.811.515	0
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0	0	0	0
4.1.04.12.08.0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	0	0	0	0
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000	15.000.000	0	0
4.1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	0	0	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	12.000.000	12.000.000	0	0
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000	5.000.000	0	0
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000	8.979.032	3.979.032	80
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	15.000.000	15.000.000	0	0
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	351.700.000	351.700.000	0	0
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	350.000.000	350.000.000	0	0
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000	300.000	0	0
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	0	0	0	0
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	0	0	0	0
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.000.000	1.000.000	0	0
4.1.04.12.09.0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	0	0	0	0
4.1.04.12.09.0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	0	0	0	0
4.1.04.12.09.0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	0	0	0	0
4.1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	300.000	300.000	0	0
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	100.000	100.000	0	0
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	200.000	1.421.185	1.221.185	611
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000	1.321.185	1.221.185	1.221
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000	100.000	0	0
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000	7.000.000	0	0
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung	7.000.000	7.000.000	0	0
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	525.100.000	801.436.585	276.336.585	53
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	525.100.000	801.436.585	276.336.585	53
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000	2.000.000	0	0
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000	1.000.000	0	0
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000	1.000.000	0	0
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	60.200.000	60.200.000	0	0
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	30.100.000	30.100.000	0	0
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.04.13.01.0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000	100.000	0	0
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	100.000	100.000	0	0
4.1.04.13.02.0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000	100.000	0	0
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	696.562.345	696.562.345	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	143.143.246	143.143.246	0
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	143.143.246	143.143.246	0
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0	23.987.000	23.987.000	0
4.1.04.15.17.0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0	23.987.000	23.987.000	0
4.1.04.15.35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0	0	0	0
4.1.04.15.35.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	0	0	0
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0	505.424.099	505.424.099	0
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	505.424.099	505.424.099	0
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0	24.008.000	24.008.000	0
4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	0	24.008.000	24.008.000	0
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0	0	0	0
4.1.04.15.66.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0	0	0	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	88.656.160.000	99.708.578.479	11.052.418.479	12
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	88.656.160.000	99.708.578.479	11.052.418.479	12
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	88.656.160.000	99.708.578.479	11.052.418.479	12
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	205.500.000	240.365.000	34.865.000	17
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	205.500.000	240.365.000	34.865.000	17
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	205.500.000	240.365.000	34.865.000	17
4.1.04.23	Remunerasi	0	0	0	0
4.1.04.23.06	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	0	0	0
4.1.04.23.06.0001	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0	0	0	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.229.554.677.305	1.275.399.614.272	45.844.936.967	4
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.783.017.000	1.030.859.812.808	48.076.795.808	5
4.2.01.01	Dana Perimbangan	982.783.017.000	1.018.019.608.808	35.236.591.808	4
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	58.756.231.000	93.818.822.808	35.062.591.808	60
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.607.144.000	1.950.758.546	(656.385.454)	(25)
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	27.056.302.000	39.800.361.054	12.744.059.054	47
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	15.421.900.000	18.517.372.574	3.095.472.574	20
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.504.000	26.680.353	1.176.353	5
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.722.863.000	21.144.023.084	9.421.160.084	80
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	635.769.000	408.894.712	(226.874.288)	(36)
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	0	10.795.070.000	10.795.070.000	0
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000	1.175.662.485	(111.086.515)	(9)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	710.591.805.000	710.591.805.000	0	0
4.2.01.01.02.0001	DAU	710.591.805.000	710.591.805.000	0	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.028.671.000	29.028.671.000	0	0
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.173.594.000	1.173.594.000	0	0
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.056.963.000	3.056.963.000	0	0
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.168.208.000	3.168.208.000	0	0
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	729.592.000	729.592.000	0	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0	0	0	0
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0	11.919.193.000	11.919.193.000	0
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0	0	0	0
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	11.919.193.000	0	(11.919.193.000)	(100)
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	0	0	0	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0	0	0	0
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.216.306.000	3.216.306.000	0	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.393.242.000	2.393.242.000	0	0
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	882.282.000	882.282.000	0	0
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.489.291.000	2.489.291.000	0	0
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0	0	0	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	184.406.310.000	184.580.310.000	174.000.000	0
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	88.333.460.000	88.507.460.000	174.000.000	0
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.540.000.000	2.540.000.000	0	0
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	57.082.933.000	57.082.933.000	0	0
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.870.500.000	1.870.500.000	0	0
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.163.680.000	6.163.680.000	0	0
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.945.170.000	1.945.170.000	0	0
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.117.740.000	21.117.740.000	0	0
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	410.496.000	410.496.000	0	0
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0	0	0	0
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0	0	0	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.662.114.000	2.662.114.000	0	0
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000	410.170.000	0	0
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	548.772.000	548.772.000	0	0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	333.900.000	333.900.000	0	0
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	438.800.000	0	0
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	548.575.000	548.575.000	0	0
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	12.840.204.000	12.840.204.000	0
4.2.01.02.01	DID	0	12.840.204.000	12.840.204.000	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0	12.840.204.000	12.840.204.000	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.771.660.305	244.539.801.464	(2.231.858.841)	(1)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	244.690.660.305	240.454.801.464	(4.235.858.841)	(2)
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	244.690.660.305	240.454.801.464	(4.235.858.841)	(2)
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	92.465.430.549	66.477.403.803	(25.988.026.746)	(28)
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49.486.668.046	44.725.579.726	(4.761.088.320)	(10)
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.115.696.739	104.705.412.063	26.589.715.324	34
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.107.672.106	1.031.213.007	(76.459.099)	(7)
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.515.192.865	23.515.192.865	0	0
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.081.000.000	4.085.000.000	2.004.000.000	96
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	2.081.000.000	4.085.000.000	2.004.000.000	96
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.081.000.000	4.085.000.000	2.004.000.000	96
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	0	0	0
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.834.686.185.305	1.881.674.038.183	46.987.852.878	3
5	BELANJA DAERAH	1.776.736.185.305	1.829.227.795.400	52.491.610.095	3
5.1	BELANJA OPERASI	1.258.070.896.764	1.334.544.970.034	76.474.073.270	6
5.1.01	Belanja Pegawai	642.824.524.724	694.132.509.545	51.307.984.821	8
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.504.580.008	341.981.872.560	14.477.292.552	4
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	237.162.067.376	257.302.921.746	20.140.854.370	8
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	210.769.081.647	224.261.878.294	13.492.796.647	6
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.392.985.729	33.041.043.452	6.648.057.723	25
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.501.357.932	21.196.102.762	(4.305.255.170)	(17)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.724.125.640	18.697.683.588	(1.026.442.052)	(5)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.777.232.292	2.498.419.174	(3.278.813.118)	(57)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.050.005.334	5.482.751.609	432.746.275	9
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.050.005.334	5.482.751.609	432.746.275	9
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0	0	0	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.805.289.108	15.941.150.686	(2.864.138.422)	(15)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.054.643.108	14.008.076.561	(2.046.566.547)	(13)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.750.646.000	1.933.074.125	(817.571.875)	(30)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.245.974.801	3.816.155.005	(429.819.796)	(10)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.212.304.801	3.706.053.755	(506.251.046)	(12)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	33.670.000	110.101.250	76.431.250	227

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.428.702.029	13.310.550.728	(3.118.151.301)	(19)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.393.172.484	11.578.362.094	(814.810.390)	(7)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.035.529.545	1.732.188.634	(2.303.340.911)	(57)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.098.459.951	519.342.517	(579.117.434)	(53)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.098.459.951	519.342.517	(579.117.434)	(53)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	0	0	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.891.647	3.996.310	(18.895.337)	(83)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.879.333	3.258.034	(7.621.299)	(70)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.012.314	738.276	(11.274.038)	(94)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.806.367.743	22.390.844.158	5.584.476.415	33
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.899.765.306	19.175.558.156	4.275.792.850	29
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.906.602.437	3.215.286.002	1.308.683.565	69
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	595.963.246	505.075.291	(90.887.955)	(15)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	496.246.326	462.065.478	(34.180.848)	(7)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	99.716.920	43.009.813	(56.707.107)	(57)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.787.500.841	1.512.981.748	(274.519.093)	(15)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.488.362.698	1.383.952.464	(104.410.234)	(7)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	299.138.143	129.029.284	(170.108.859)	(57)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	167.288.724.424	192.199.593.067	24.910.868.643	15
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	159.068.666.682	187.994.043.525	28.925.376.843	18
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	159.043.047.834	187.829.743.945	28.786.696.111	18
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	25.618.848	164.299.580	138.680.732	541
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.316.565.150	3.646.764.679	330.199.529	10
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.316.565.150	3.646.764.679	330.199.529	10
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0	0	0	0
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	461.680.185	558.784.863	97.104.678	21
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	461.680.185	558.784.863	97.104.678	21
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.441.812.407	0	(4.441.812.407)	(100)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.441.812.407	0	(4.441.812.407)	(100)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	94.194.151.062	94.192.339.958	(1.811.104)	(0)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.324.920.888	10.772.861.344	447.940.456	4
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	714.000.000	1.096.200.000	382.200.000	54
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.478.000.000	2.562.000.000	84.000.000	3
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	126.000.000	336.000.000	210.000.000	167
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	428.400.000	283.500.000	(144.900.000)	(34)
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.947.120.000	1.365.840.000	(581.280.000)	(30)
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	37.800.000	100.800.000	63.000.000	167
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.256.455.852	1.256.455.852	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.337.145.036	3.772.065.492	434.920.456	13
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.768.871.400	2.068.677.395	(700.194.005)	(25)
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	301.250.000	1.250.000	(300.000.000)	(100)
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.262.000.000	1.262.000.000	0	0
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.000.000	0	(125.000.000)	(100)
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	140.410.000	140.410.000	0	0
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	90.000.000	0	(90.000.000)	(100)
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000	4.000.000	0	0
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	9.120.000	(880.000)	(9)
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	130.562.350	83.166.545	(47.395.805)	(36)
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.500.000	1.050.000	(450.000)	(30)
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	50.000.000	35.000.000	(15.000.000)	(30)
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	20.087.500	20.087.500	0	0
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	98.968.200	0	(98.968.200)	(100)
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	163.680.000	163.680.000	0	0
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.099.500	2.099.500	0	0
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	22.500.000	0	(22.500.000)	(100)
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	346.813.850	346.813.850	0	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.082.933.000	57.082.933.000	0	0
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	57.082.933.000	57.082.933.000	0	0
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.870.500.000	1.870.500.000	0	0
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.870.500.000	1.870.500.000	0	0
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.500.112.795	2.545.280.000	45.167.205	2
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.500.112.795	2.545.280.000	45.167.205	2
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.392.712.979	18.639.276.219	246.563.240	1
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.935.172.979	14.976.186.219	41.013.240	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.457.540.000	3.663.090.000	205.550.000	6
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.254.100.000	1.212.812.000	(41.288.000)	(3)
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	66.600.000	62.440.000	(4.160.000)	(6)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.187.500.000	1.150.372.000	(37.128.000)	(3)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.508.965.878	28.362.891.412	(146.074.466)	(1)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.148.482.946	1.004.010.000	(144.472.946)	(13)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.148.482.946	1.004.010.000	(144.472.946)	(13)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	128.024.400	128.213.400	189.000	0
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	128.024.400	128.213.400	189.000	0
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.045.200	139.046.400	1.200	0
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.045.200	139.046.400	1.200	0
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000	86.058.000	0	0
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000	86.058.000	0	0
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500	1.455.814.500	0	0
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500	1.455.814.500	0	0
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500	119.668.500	0	0
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500	119.668.500	0	0
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300	14.433.300	0	0
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300	14.433.300	0	0
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000	7.938.000.000	0	0
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000	7.938.000.000	0	0
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000	1.984.500.000	0	0
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000	1.984.500.000	0	0
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264	462.264	0	0
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264	462.264	0	0
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.827.476.768	8.825.685.048	(1.791.720)	(0)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	71.215.200	69.423.480	(1.791.720)	(3)
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392	2.065.392	0	0
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176	6.196.176	0	0
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.748.000.000	8.748.000.000	0	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000	6.642.000.000	0	0
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000	6.642.000.000	0	0
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000	25.000.000	0	0
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000	25.000.000	0	0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.593.946.402	2.131.341.762	537.395.360	34
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.614.358	58.614.358	0	0
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.614.358	58.614.358	0	0
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000	7.644.000	0	0
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000	7.644.000	0	0
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040	8.111.040	0	0
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040	8.111.040	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	404.362	404.362	0	0
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	404.362	404.362	0	0
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120	1.120	0	0
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120	1.120	0	0
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960	6.420.960	0	0
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960	6.420.960	0	0
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.342.301.402	1.913.361.762	571.060.360	43
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	84.000.000	208.800.000	124.800.000	149
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	282.000.000	488.000.000	206.000.000	73
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	24.000.000	64.000.000	40.000.000	167
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	51.600.000	54.000.000	2.400.000	5
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	218.880.000	260.160.000	41.280.000	19
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	7.200.000	19.200.000	12.000.000	167
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	226.267.254	226.267.254	0	0
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	448.354.148	592.934.508	144.580.360	32
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	71.645.000	37.980.000	(33.665.000)	(47)
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	35.100.000	35.100.000	0	0
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.000.000	2.880.000	880.000	44
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	34.545.000	0	(34.545.000)	(100)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.170.966.733	1.288.966.733	118.000.000	10
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000	393.120.000	0	0
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000	393.120.000	0	0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	777.846.733	895.846.733	118.000.000	15
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	777.846.733	895.846.733	118.000.000	15
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	22.563.190.217	33.975.504.053	11.412.313.836	51
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	22.563.190.217	33.975.504.053	11.412.313.836	51
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	22.563.190.217	33.975.504.053	11.412.313.836	51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.419.718.840	565.032.296.980	28.612.578.140	5
5.1.02.01	Belanja Barang	128.673.037.304	141.346.750.395	12.673.713.091	10
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	127.337.046.245	140.142.612.010	12.805.565.765	10

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.159.324.964	9.147.970.856	(1.011.354.108)	(10)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	875.074.730	755.876.005	(119.198.725)	(14)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.139.292.640	15.812.604.936	3.673.312.296	30
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.822.840.972	2.832.011.110	9.170.138	0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	22.185.120	21.502.560	(682.560)	(3)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	91.181.400	67.652.400	(23.529.000)	(26)
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	113.355.500	117.402.700	4.047.200	4
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.307.764.607	4.857.254.455	2.549.489.848	110
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	803.758.000	803.758.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.305.694.498	12.426.466.502	120.772.004	1
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.772.415.443	2.796.079.575	23.664.132	1
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	77.460.300	83.821.100	6.360.800	8
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	512.844.720	500.734.820	(12.109.900)	(2)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.618.396.038	2.659.274.342	40.878.304	2
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	864.196.075	963.761.267	99.565.192	12
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	767.622.868	800.602.551	32.979.683	4
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	61.977.500	61.977.500	0	0
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.111.000	24.048.000	(63.000)	(0)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	667.064.380	720.583.630	53.519.250	8
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.035.394.436	1.230.757.321	195.362.885	19
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.199.999.120	2.611.729.273	411.730.153	19
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.397.081.791	2.059.048.564	(3.338.033.227)	(62)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.995.256.184	22.195.563.684	7.200.307.500	48
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.360.193.400	12.576.610.225	2.216.416.825	21
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.812.835.000	19.911.242.610	98.407.610	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.388.887.000	3.303.342.366	914.455.366	38
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	842.977.359	741.973.958	(101.003.401)	(12)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	253.700.000	99.715.000	(153.985.000)	(61)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	436.200.000	538.800.000	102.600.000	24
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.914.435.000	16.244.306.000	329.871.000	2
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	25.000.000	25.000.000	0	0
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	544.500.000	162.000.000	(382.500.000)	(70)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.000.000	5.000.000	0	0
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	57.500.000	25.000.000	(32.500.000)	(57)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	977.712.000	912.600.000	(65.112.000)	(7)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	991.004.200	968.480.700	(22.523.500)	(2)
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.500.000	7.650.000	4.150.000	119
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	293.200.000	283.000.000	(10.200.000)	(3)
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000	10.000.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	451.610.000	505.910.000	54.300.000	12
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	334.500.000	271.500.000	(63.000.000)	(19)
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.335.991.059	1.204.138.385	(131.852.674)	(10)
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	1.335.991.059	1.204.138.385	(131.852.674)	(10)
5.1.02.02	Belanja Jasa	224.140.791.510	219.392.543.278	(4.748.248.232)	(2)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	174.523.095.274	171.494.106.799	(3.028.988.475)	(2)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.950.856.000	3.264.349.668	(686.506.332)	(17)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.442.234.000	11.705.911.000	(2.736.323.000)	(19)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.100.000	5.100.000	0	0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	803.350.000	818.700.000	15.350.000	2
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	29.700.000	33.500.000	3.800.000	13
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	381.980.000	411.680.000	29.700.000	8
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	311.500.000	383.747.500	72.247.500	23
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	4.458.500.000	4.126.500.000	(332.000.000)	(7)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.665.200.000	8.587.800.000	(77.400.000)	(1)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.673.491.881	8.040.613.381	(632.878.500)	(7)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	707.674.000	928.399.000	220.725.000	31
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	35.812.692.825	35.737.028.099	(75.664.726)	(0)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	8.517.365.000	8.232.665.000	(284.700.000)	(3)
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	912.750.000	888.875.000	(23.875.000)	(3)
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	407.900.000	379.200.000	(28.700.000)	(7)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.625.700.000	6.249.665.500	(376.034.500)	(6)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.454.250.000	1.447.520.000	(6.730.000)	(0)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.045.250.000	4.221.163.858	175.913.858	4
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.025.100.000	1.572.092.000	(453.008.000)	(22)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.531.550.000	5.399.631.200	(131.918.800)	(2)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.798.470.000	8.961.647.094	163.177.094	2
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.453.550.000	2.474.443.090	20.893.090	1
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0	64.800.000	64.800.000	0
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	393.250.000	363.250.000	(30.000.000)	(8)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	541.450.000	477.900.000	(63.550.000)	(12)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	24.960.000	16.960.000	(8.000.000)	(32)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.448.380.000	3.288.300.000	(160.080.000)	(5)
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	217.000.000	99.000.000	(118.000.000)	(54)
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	346.500.000	426.500.000	80.000.000	23
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	172.024.098	189.819.098	17.795.000	10
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.994.971.320	3.358.852.243	363.880.923	12
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	213.900.000	414.276.000	200.376.000	94

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	205.000.000	205.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	92.245.000	30.245.000	(62.000.000)	(67)
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	320.818.000	312.098.000	(8.720.000)	(3)
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	61.462.400	60.955.600	(506.800)	(1)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.657.176.500	3.081.740.800	424.564.300	16
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	408.377.780	329.309.445	(79.068.335)	(19)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.794.003.182	1.863.981.049	69.977.867	4
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.660.016.905	32.491.061.028	1.831.044.123	6
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	355.587.000	384.103.100	28.516.100	8
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.890.316.383	4.557.033.046	(333.283.337)	(7)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	105.554.000	71.832.000	(33.722.000)	(32)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	102.000.000	79.800.000	(22.200.000)	(22)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.503.939.000	5.457.059.000	(46.880.000)	(1)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.165.387.078	23.181.895.954	16.508.876	0
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.312.782.000	13.830.566.400	517.784.400	4
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.280.193.600	1.971.950.400	691.756.800	54
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.530.045.129	3.407.662.943	(122.382.186)	(3)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	258.270.937	261.061.774	2.790.837	1
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.599.095.412	3.605.773.637	6.678.225	0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.185.000.000	104.880.800	(1.080.119.200)	(91)
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	162.305.000	149.968.500	(12.336.500)	(8)
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	162.305.000	149.968.500	(12.336.500)	(8)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.420.122.480	13.521.244.326	2.101.121.846	18
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	6.052.172.800	7.729.555.896	1.677.383.096	28
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.211.000.000	2.473.449.250	262.449.250	12
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0	20.000.000	20.000.000	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	260.149.480	240.888.480	(19.261.000)	(7)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.250.335.000	1.254.203.000	3.868.000	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	184.980.000	290.500.000	105.520.000	57
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	31.250.000	27.275.000	(3.975.000)	(13)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	320.757.700	356.927.700	36.170.000	11
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000	105.500.000	65.500.000	164
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	0	0	0	0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	969.477.500	922.945.000	(46.532.500)	(5)
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.936.291.000	1.880.134.000	(56.157.000)	(3)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	26.940.000	26.940.000	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.186.291.000	959.194.000	(227.097.000)	(19)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	225.000.000	90.000.000	(135.000.000)	(60)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	119.000.000	98.000.000	(21.000.000)	(18)
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000	700.000.000	300.000.000	75
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	6.000.000	6.000.000	0	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	90.000.000	85.500.000	(4.500.000)	(5)
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0	31.500.000	31.500.000	0
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	90.000.000	54.000.000	(36.000.000)	(40)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	895.757.224	750.137.353	(145.619.871)	(16)
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	100.000.000	0	(100.000.000)	(100)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	316.755.000	199.493.441	(117.261.559)	(37)
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	199.344.894	331.408.412	132.063.518	66
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	15.000.000	0	(15.000.000)	(100)
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	28.000.000	65.000.000	37.000.000	132
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	58.787.500	40.897.500	(17.890.000)	(30)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	177.869.830	113.338.000	(64.531.830)	(36)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.857.050.454	5.170.833.346	(1.686.217.108)	(25)
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.281.910.275	822.440.000	(459.470.275)	(36)
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-K keuangan	0	230.000.000	230.000.000	0
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	11.750.000	11.750.000	0	0
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0	40.000.000	40.000.000	0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.047.000.000	829.046.816	(217.953.184)	(21)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.302.979.900	2.662.320.000	(640.659.900)	(19)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.213.410.279	575.276.530	(638.133.749)	(53)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	245.000.000	522.380.000	277.380.000	113
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	245.000.000	522.380.000	277.380.000	113
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.795.783.000	2.611.343.000	(2.184.440.000)	(46)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.212.761.000	838.645.000	(374.116.000)	(31)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.345.500.000	1.636.698.000	(1.708.802.000)	(51)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	237.522.000	136.000.000	(101.522.000)	(43)
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	(50)
5.1.02.02.15.0005	Belanja sewa aset tidak berwujud-software	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	(50)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.064.847.999	37.182.769.352	117.921.353	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.006.070.388	13.727.228.313	1.721.157.925	14
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	116.500.000	116.500.000	0	0
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	125.000.000	125.000.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	78.600.000	66.800.000	(11.800.000)	(15)
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	35.000.000	25.000.000	(10.000.000)	(29)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	239.341.500	204.716.020	(34.625.480)	(14)
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	10.000.000	10.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	90.000.000	20.000.000	(70.000.000)	(78)
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	252.550.000	252.550.000	0	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.173.568.657	1.129.518.657	(44.050.000)	(4)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.210.919.030	3.242.451.915	31.532.885	1
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.632.239.082	2.602.634.082	(29.605.000)	(1)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	833.786.214	694.006.719	(139.779.495)	(17)
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	78.989.280	81.451.680	2.462.400	3
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	51.540.000	51.540.000	0	0
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.000.000	50.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)	(80)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	131.720.000	153.820.000	22.100.000	17
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	828.337.484	771.098.584	(57.238.900)	(7)
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	35.500.000	35.500.000	0	0
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	57.750.000	45.000.000	(12.750.000)	(22)
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF	13.500.000	13.500.000	0	0
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	51.237.500	0	(51.237.500)	(100)
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	156.500.000	155.500.000	(1.000.000)	(1)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	746.562.641	754.109.441	7.546.800	1
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	521.329.000	535.916.000	14.587.000	3
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	35.000.000	35.000.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	360.600.000	2.505.615.215	2.145.015.215	595
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.230.868.308	8.236.501.039	(994.367.269)	(11)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.287.595.574	7.374.532.305	(913.063.269)	(11)
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	226.749.314	226.749.314	0	0
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	436.283.420	436.283.420	0	0
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	98.464.000	98.464.000	0
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	270.640.000	92.072.000	(178.568.000)	(66)
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	9.600.000	8.400.000	(1.200.000)	(13)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.560.509.303	14.750.880.000	(809.629.303)	(5)
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	17.509.303	0	(17.509.303)	(100)
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	15.500.000.000	14.708.880.000	(791.120.000)	(5)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	43.000.000	42.000.000	(1.000.000)	(2)
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	267.400.000	468.160.000	200.760.000	75
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	267.400.000	468.160.000	200.760.000	75
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	28.341.292.213	29.080.827.250	739.535.037	3
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.341.292.213	29.080.827.250	739.535.037	3
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.440.855.213	13.429.054.250	988.199.037	8
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.900.437.000	15.651.773.000	(248.664.000)	(2)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.566.586.000	6.067.696.000	1.501.110.000	33
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.861.156.000	4.148.451.000	1.287.295.000	45
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.661.156.000	3.688.451.000	1.027.295.000	39
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	200.000.000	160.000.000	(40.000.000)	(20)
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	300.000.000	300.000.000	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.705.430.000	1.919.245.000	213.815.000	13
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.688.930.000	1.904.045.000	215.115.000	13
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.500.000	15.200.000	(1.300.000)	(8)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.817.001.884	51.304.658.207	487.656.323	1
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.817.001.884	51.304.658.207	487.656.323	1
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.817.001.884	51.304.658.207	487.656.323	1
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.816.161.930	80.657.052.498	17.840.890.568	28
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.816.161.930	80.657.052.498	17.840.890.568	28
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.816.161.930	80.657.052.498	17.840.890.568	28

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.03	Belanja Bunga	1.200.000.000	982.342.741	(217.657.259)	(18)
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.200.000.000	982.342.741	(217.657.259)	(18)
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah	1.200.000.000	982.342.741	(217.657.259)	(18)
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah	1.200.000.000	982.342.741	(217.657.259)	(18)
5.1.05	Belanja Hibah	71.115.353.200	68.237.715.000	(2.877.638.200)	(4)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.223.200	0	(13.223.200)	(100)
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.223.200	0	(13.223.200)	(100)
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.223.200	0	(13.223.200)	(100)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.276.350.000	35.425.925.000	(2.850.425.000)	(7)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.250.000.000	16.850.000.000	(4.400.000.000)	(21)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.250.000.000	16.850.000.000	(4.400.000.000)	(21)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.708.850.000	15.808.425.000	1.099.575.000	7
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.600.000.000	8.350.000.000	1.750.000.000	27
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.108.850.000	7.458.425.000	(650.425.000)	(8)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.317.500.000	2.767.500.000	450.000.000	19
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.317.500.000	2.767.500.000	450.000.000	19
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	29.511.190.000	29.497.200.000	(13.990.000)	(0)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.511.190.000	29.497.200.000	(13.990.000)	(0)
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.511.190.000	29.497.200.000	(13.990.000)	(0)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	3.314.590.000	0	0
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	3.314.590.000	0	0
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	3.314.590.000	3.314.590.000	0	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.511.300.000	6.160.105.768	(351.194.232)	(5)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.211.300.000	1.781.105.768	569.805.768	47
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.211.300.000	1.781.105.768	569.805.768	47
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.211.300.000	1.781.105.768	569.805.768	47
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.600.000.000	4.379.000.000	(221.000.000)	(5)
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	4.600.000.000	4.379.000.000	(221.000.000)	(5)
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.600.000.000	4.379.000.000	(221.000.000)	(5)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000	0	(500.000.000)	(100)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000	0	(500.000.000)	(100)
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000	0	(500.000.000)	(100)
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000	0	(200.000.000)	(100)
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000	0	(200.000.000)	(100)
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000	0	(200.000.000)	(100)
5.2	BELANJA MODAL	516.665.288.541	492.260.944.462	(24.404.344.079)	(5)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.212.076.120	12.942.857.200	(4.269.218.920)	(25)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	17.212.076.120	12.942.857.200	(4.269.218.920)	(25)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	16.962.076.120	12.942.857.200	(4.019.218.920)	(24)
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	16.962.076.120	12.942.857.200	(4.019.218.920)	(24)
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	250.000.000	0	(250.000.000)	(100)
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	250.000.000	0	(250.000.000)	(100)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.184.513.925	43.707.010.035	2.522.496.110	6
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	382.291.800	539.942.800	157.651.000	41
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	242.341.800	405.742.800	163.401.000	67
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	242.341.800	235.726.800	(6.615.000)	(3)
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0	170.016.000	170.016.000	0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	139.950.000	134.200.000	(5.750.000)	(4)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	139.950.000	134.200.000	(5.750.000)	(4)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.826.874.660	2.203.453.950	(623.420.710)	(22)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.826.874.660	2.203.453.950	(623.420.710)	(22)
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.472.826.060	1.259.405.350	(213.420.710)	(14)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.000.000	90.000.000	0	0
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.000.000	0	(70.000.000)	(100)
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	340.000.000	0	(340.000.000)	(100)
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	854.048.600	854.048.600	0	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	123.555.500	143.855.500	20.300.000	16
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	112.000.000	12.000.000	(100.000.000)	(89)
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	112.000.000	12.000.000	(100.000.000)	(89)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	11.555.500	131.855.500	120.300.000	1.041
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0	7.300.000	7.300.000	0
5.2.02.03.03.0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	11.555.500	11.555.500	0	0
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0	113.000.000	113.000.000	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	215.242.000	235.242.000	20.000.000	9
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	215.242.000	235.242.000	20.000.000	9
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	199.242.000	199.242.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	16.000.000	36.000.000	20.000.000	125
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.615.926.799	5.325.440.467	(1.290.486.332)	(20)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	955.065.400	930.870.100	(24.195.300)	(3)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	373.246.600	364.269.900	(8.976.700)	(2)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	581.818.800	566.600.200	(15.218.600)	(3)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.531.561.399	4.382.959.967	(1.148.601.432)	(21)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.249.642.100	2.858.032.019	(391.610.081)	(12)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	25.187.400	39.679.300	14.491.900	58
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	542.631.835	561.636.798	19.004.963	4
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.883.600	9.240.500	6.356.900	220
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.663.216.464	857.461.350	(805.755.114)	(48)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	48.000.000	56.910.000	8.910.000	19
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	129.300.000	11.610.400	(117.689.600)	(91)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	129.300.000	11.610.400	(117.689.600)	(91)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	612.981.272	421.932.440	(191.048.832)	(31)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	465.576.992	156.778.160	(308.798.832)	(66)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	232.065.442	130.783.610	(101.281.832)	(44)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	233.511.550	25.994.550	(207.517.000)	(89)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	41.732.280	159.482.280	117.750.000	282
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	41.732.280	159.482.280	117.750.000	282
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	105.672.000	105.672.000	0	0
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	105.672.000	105.672.000	0	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.082.477.065	18.025.400.180	2.942.923.115	20
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.242.865.645	16.029.217.810	2.786.352.165	21
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.242.865.645	16.029.217.810	2.786.352.165	21
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.839.611.420	1.996.182.370	156.570.950	9
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.839.611.420	1.996.182.370	156.570.950	9
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.319.912.821	1.007.037.821	(312.875.000)	(24)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.319.912.821	1.007.037.821	(312.875.000)	(24)
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.319.912.821	1.007.037.821	(312.875.000)	(24)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.534.426.059	5.879.273.789	344.847.730	6
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.279.180.983	3.260.114.369	(19.066.614)	(1)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	7.250.000	0	(7.250.000)	(100)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.921.566.783	2.882.093.265	(39.473.518)	(1)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	350.364.200	378.021.104	27.656.904	8
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.255.245.076	2.619.159.420	363.914.344	16
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.874.700	2.799.000	924.300	49
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	17.873.200	0	(17.873.200)	(100)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.119.359.600	1.248.689.890	129.330.290	12

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.114.939.976	1.359.092.930	244.152.954	22
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.197.600	8.577.600	7.380.000	616
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	26.000.000	26.000.000	0	0
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	26.000.000	26.000.000	0	0
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik	26.000.000	26.000.000	0	0
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0	0	0	0
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	0	0	0
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0	0	0	0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	575.271.220	916.610.920	341.339.700	59
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	575.271.220	916.610.920	341.339.700	59
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0	243.552.400	243.552.400	0
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	575.271.220	673.058.520	97.787.300	17
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	54.000.000	54.000.000	0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	54.000.000	54.000.000	0
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0	54.000.000	54.000.000	0
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.101.459.460	4.525.185.926	423.726.466	10
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.101.459.460	4.525.185.926	423.726.466	10
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.101.459.460	4.525.185.926	423.726.466	10
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.768.095.269	4.403.634.242	635.538.973	17
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.768.095.269	4.403.634.242	635.538.973	17
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.768.095.269	4.403.634.242	635.538.973	17
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.947.160.095	100.141.591.508	(12.805.568.587)	(11)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	108.957.700.629	96.744.337.330	(12.213.363.299)	(11)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	108.957.700.629	96.744.337.330	(12.213.363.299)	(11)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	68.304.396.830	60.244.063.307	(8.060.333.523)	(12)
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	184.508.217	184.508.217	0
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.685.906.414	31.341.881.000	(1.344.025.414)	(4)
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.740.692.570	1.041.255.230	(2.699.437.340)	(72)
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	1.500.000	1.500.000	0
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	522.508.930	226.933.691	(295.575.239)	(57)
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	802.786.664	802.786.664	0	0
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	181.409.221	181.409.221	0	0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.720.000.000	2.720.000.000	0	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	733.246.883	1.235.846.595	502.599.712	69
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	733.246.883	1.235.846.595	502.599.712	69
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	733.246.883	1.235.846.595	502.599.712	69
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.256.212.583	2.161.407.583	(1.094.805.000)	(34)
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.256.212.583	2.161.407.583	(1.094.805.000)	(34)
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.256.212.583	2.161.407.583	(1.094.805.000)	(34)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.847.881.301	326.374.376.611	(10.473.504.690)	(3)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	238.491.919.094	242.212.057.420	3.720.138.326	2
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	233.399.129.094	240.712.057.420	7.312.928.326	3
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	233.143.493.000	240.514.961.019	7.371.468.019	3
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	255.636.094	197.096.401	(58.539.693)	(23)
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.092.790.000	1.500.000.000	(3.592.790.000)	(71)
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.900.000.000	1.500.000.000	(3.400.000.000)	(69)
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	192.790.000	0	(192.790.000)	(100)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	97.633.391.911	83.727.816.169	(13.905.575.742)	(14)
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	90.911.943.925	76.285.236.164	(14.626.707.761)	(16)
5.2.04.02.02.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	732.902.720	1.182.902.720	450.000.000	61
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	90.179.041.205	75.102.333.444	(15.076.707.761)	(17)
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.721.447.986	7.442.580.005	721.132.019	11
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.721.447.986	7.442.580.005	721.132.019	11
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	524.570.296	331.150.922	(193.419.374)	(37)
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	524.570.296	331.150.922	(193.419.374)	(37)
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	524.570.296	331.150.922	(193.419.374)	(37)
5.2.04.99	Belanja Modal Jalab, Jaringan dan Irigasi BLUD	198.000.000	103.352.100	(94.647.900)	(48)
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalab, Jaringan dan Irigasi BLUD	198.000.000	103.352.100	(94.647.900)	(48)
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalab, Jaringan dan Irigasi BLUD	198.000.000	103.352.100	(94.647.900)	(48)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.396.409.900	6.801.378.183	404.968.283	6
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	30.250.000	29.987.150	(262.850)	(1)
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	30.250.000	29.987.150	(262.850)	(1)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	30.250.000	29.987.150	(262.850)	(1)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	2.200.000	2.200.000	0
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0	2.200.000	2.200.000	0
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	0	2.200.000	2.200.000	0
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0	3.500.000	3.500.000	0
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0	3.500.000	3.500.000	0
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0	3.500.000	3.500.000	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000	520.000.000	220.000.000	73
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000	520.000.000	220.000.000	73
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	50.000.000	320.000.000	270.000.000	540
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	250.000.000	200.000.000	(50.000.000)	(20)
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.066.159.900	5.876.391.033	(189.768.867)	(3)
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.066.159.900	5.876.391.033	(189.768.867)	(3)
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.066.159.900	5.876.391.033	(189.768.867)	(3)
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0	369.300.000	369.300.000	0
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0	369.300.000	369.300.000	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0	369.300.000	369.300.000	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.077.247.200	2.293.730.925	216.483.725	10
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.072.747.200	2.153.180.925	80.433.725	4
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.072.747.200	2.153.180.925	80.433.725	4
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	15.150.000	0	(15.150.000)	(100)
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	472.998.400	550.331.100	77.332.700	16
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	972.690.000	918.192.925	(54.497.075)	(6)
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	611.908.800	684.656.900	72.748.100	12
5.2.06.99	Belanja Model Aset Lainnya BLUD	4.500.000	140.550.000	136.050.000	3.023
5.2.06.99.99	Belanja Model Aset Lainnya BLUD	4.500.000	140.550.000	136.050.000	3.023
5.2.06.99.99.9999	Belanja Model Aset Lainnya BLUD	4.500.000	140.550.000	136.050.000	3.023
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.421.880.904	421.880.904	21
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.421.880.904	421.880.904	21
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.421.880.904	421.880.904	21
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.421.880.904	421.880.904	21
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.421.880.904	421.880.904	21
Jumlah Belanja		1.776.736.185.305	1.829.227.795.400	52.491.610.095	3
Surplus/Defisit		57.950.000.000	52.446.242.783	(5.503.757.217)	(9)
6	Pembiayaan	99.050.000.000	98.553.757.217	(496.242.783)	(1)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.550.000.000	23.053.757.217	2.503.757.217	12
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	20.500.000.000	23.003.757.217	2.503.757.217	12
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.500.000.000	23.003.757.217	2.503.757.217	12
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.500.000.000	23.003.757.217	2.503.757.217	12
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.500.000.000	23.003.757.217	2.503.757.217	12
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000	50.000.000	0	0
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000	50.000.000	0	0
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000	50.000.000	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.550.000.000	23.053.757.217	2.503.757.217	12
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.500.000.000	75.500.000.000	(3.000.000.000)	(4)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.500.000.000	13.500.000.000	(3.000.000.000)	(18)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.500.000.000	13.500.000.000	(3.000.000.000)	(18)
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.500.000.000	13.500.000.000	(3.000.000.000)	(18)
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.500.000.000	13.500.000.000	(3.000.000.000)	(18)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo	62.000.000.000	62.000.000.000	0	0
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	62.000.000.000	62.000.000.000	0	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	62.000.000.000	62.000.000.000	0	0
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	62.000.000.000	62.000.000.000	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.500.000.000	75.500.000.000	(3.000.000.000)	(4)
Pembiayaan Netto		(57.950.000.000)	(52.446.242.783)	5.503.757.217	(9)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0	0

WALI KOTA PONTIANAK

ttd

EDI RUSDI KAMTONO